PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

UNIT KERJA : **UNIVERSITAS HASANUDDIN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DARMAWATI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DEPARTEMEN AKUNTANSI**
3. NHK : **914780**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 2.414.550.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 240.750.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/98 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.243.800.000
4. Tanah Seluas 98 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
5. Tanah Seluas 98 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
6. Tanah Seluas 718 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 149.748.400

1. MOBIL, TOYOTA RUSH RUSH 1.5 S/MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, NISSAN JUKE 1.5 A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 CBS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

4. MOTOR, YAMAHA ALL NEW NMAX 155 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.814.400
5. MOTOR, YAHAMA GRAND FILANO HIBRID LUX Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 30.934.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**161.346.100**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**165.276.945**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**370.500.000**
	Sub Total	**Rp.**	**3.261.421.445**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**330.862.044**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**2.930.559.401**

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.